

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI



Rencana Kerja Tahun 2026



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
NOMOR : SK. 107 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Amar Kedua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.227 Tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi (Balai TNGM) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai TNGM tentang Rencana Kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Surat...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 TAHUN 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI TENTANG RENCANA KERJA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tamana Nasional

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 5 Desember 2025



Kepala Balai,

Muhammad Wahyudi, S.P, M.Sc
NIP.19730922 199903 1 003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal KSDAE di Jakarta.
2. Sekretaris Ditjen KSDAE di Jakarta.

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
TAHUN 2026**

Disusun di Yogyakarta
Pada Tanggal Desember 2026

Disahkan
Pada Tanggal Desember 2025

Oleh
Kepala Balai
Taman Nasional Gunung Merapi

Dr. Ahmad Wahyudi, S.P., M.Sc.
NIP. 197309221999031003



Disusun

Oleh
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Dr. Pairah, S.Si., M.P.
NIP. 197112201999032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai acuan formal bagi seluruh jajaran Balai TNGM dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan berbagai program konservasi sepanjang tahun anggaran 2026.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” Balai TNGM berkomitmen penuh untuk mendukung Prioritas Nasional, khususnya dalam memantapkan ekonomi hijau dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan desa-desa penyangga di sekitar kawasan.

Penyusunan rencana kerja ini tetap menitikberatkan pada tiga pilar utama: perlindungan dan pelestarian ekosistem, peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), kami berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian alam sekaligus kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi rencana ini sangat bergantung pada sinergi, komitmen, dan kerja keras seluruh sumber daya manusia di lingkungan Balai TNGM, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat terlaksana secara optimal, akuntabel, dan transparan, sehingga Taman Nasional Gunung Merapi tetap terjaga kelestariannya sebagai warisan alam bagi generasi mendatang.

Yogyakarta, Desember 2025
Ketua Tim Penyusun,

Dr. Pairah, S.Si., M.P.
NIP. 197112201999032002



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II CAPAIAN SASARN PROGRAM TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	10
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	10
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	13
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025	17
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS TAHUN 2025	17
B. PROGRAM, SASASARN PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2025	20
C. PENGARUSUTAMAAN	28
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	26



DAFTAR TABEL :

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Pegawai Taman Nasional Gunung Merapi Berdasarkan Jabatan 2025	8
Tabel 2 Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025.....	11
Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2025.....	13
Tabel 4 Realisasi Anggaran tahun tahun 2024 dan tahun 2025.....	14
Tabel 5 Rincian Output Kinerja Kegiatan tahun 2025.....	15
Tabel 6 Alokasi anggaran Balai TN Gunung Merapi dalam mendukung Prioritas Nasional	18
Tabel 7 Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Kementerian Kehutanan pada Prioritas Nasional 2.....	18
Tabel 8 Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Kementerian Kehutanan pada Prioritas Nasional 6.....	20
Tabel 9 Sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029.....	23
Tabel 10 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1, 2 dan 3.....	23
Tabel 11 Target Rincian Output Tahun 2026	25
Tabel 12 Detail Kegiatan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2026.....	27



DAFTAR GAMBAR :

	Halaman
Gambar 1 Jumlah dan Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia	1
Gambar 2 Sejarah Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merapi	2
Gambar 3. 30 Desa Penyangga Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	4
Gambar 4 Pendekatan Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam RKP Tahun 2025.....	6
Gambar 5 Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi.....	8
Gambar 6 <i>Komposisi Anggaran Tahun 2026</i>	21
Gambar 7 <i>Target Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2026</i>	25



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem menjadi salah satu pilar utama yang harus diperhatikan. Rencana kerja ini disusun untuk mendukung prioritas nasional dalam menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keberagaman hayati dan ekosistem yang sehat memiliki peran vital dalam kehidupan manusia. Mereka tidak hanya menyediakan sumber daya, seperti air bersih, pangan, dan obat-obatan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas iklim dan pengurangan bencana alam. Oleh karena itu, rencana kerja ini bertujuan untuk: Melindungi dan Melestarikan Ekosistem: Dengan melakukan rehabilitasi habitat dan pengelolaan yang bijaksana, kita dapat memastikan bahwa ekosistem tetap berfungsi dengan baik dan mampu mendukung kehidupan berbagai spesies.

Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi menjadi kunci untuk menciptakan komitmen bersama dalam menjaga sumber daya alam.

Mendorong Pemanfaatan Sumber Daya yang Berkelanjutan: Rencana ini juga mencakup upaya untuk mendorong praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga ramah lingkungan.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan rencana kerja konservasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan memastikan warisan alam yang berharga untuk generasi mendatang.

Sebanyak 568 unit kawasan konservasi di Indonesia yang terletak dari Sabang sampai Merauke merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud terdiri dari 214 unit cagar alam seluas 4,18 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,9 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,09 juta hektar, 130 unit taman wisata alam seluas 796 ribu hektar, 39 unit taman hutan raya seluas 383 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 160 ribu hektar serta 40 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 387 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.



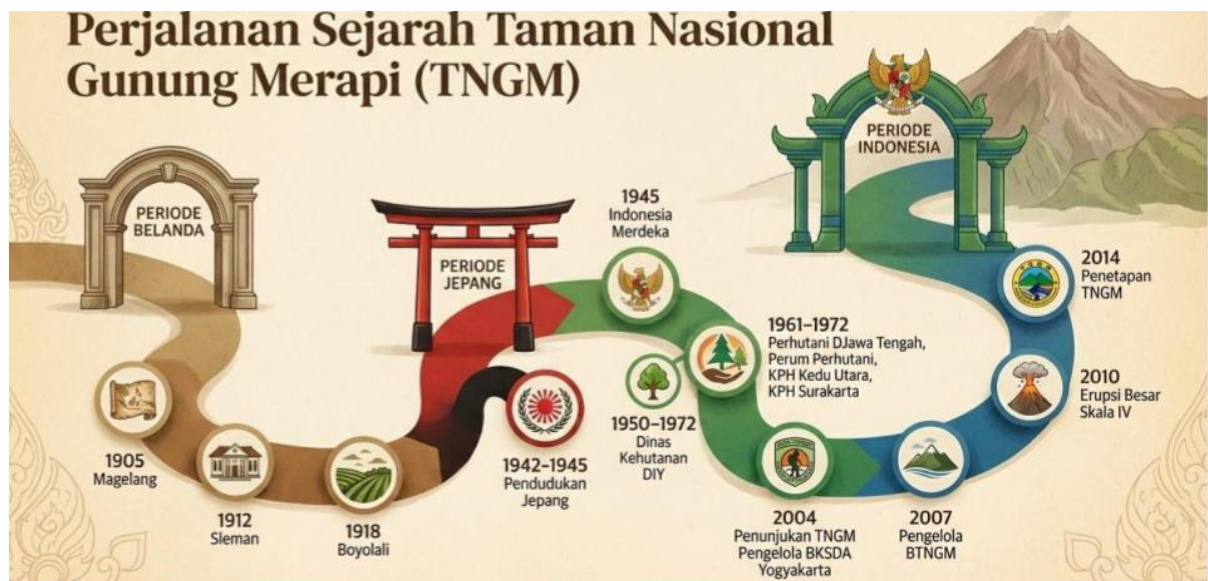


Gambar 1. Jumlah dan Luasan Kawasan Konservasi di Indonesia

Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) sendiri merupakan kawasan konservasi yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Propinsi Jawa Tengah. Sejak era kolonial, sebagian besar lanskap Gunung Merapi merupakan hutan negara yang dikelola oleh Belanda (1905-1942), Jepang (1942-1945) dan Pemerintah Republik Indonesia (1945-sekarang). Sedangkan hutan di lereng selatan sebelum menjadi Kawasan TNGM sebagian besar difungsikan sebagai hutan lindung, sebagian kecil cagar alam dan taman wisata alam, di bawah wewenang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hutan di lereng barat, utara dan timur didominasi hutan lindung dan sedikit hutan produksi yang dikelola perusahaan hutan milik negara (Perum Perhutani) Bagian Hutan Kedu Utara dan Bagian Hutan Surakarta.

Perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Merapi sebagai hutan konservasi dimulai sejak tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.134/Menhut-II/2004 tanggal 04 Mei 2004 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam pada kelompok hutan Gunung Merapi seluas + 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurun waktu 10 tahun sejak ditunjuk, kawasan TNGM ditetapkan dengan luas 6.607,52 Ha sesuai dengan SK Penetapan Nomor: SK.3627/Menhut-VII/2014 tanggal 6 Mei 2014.





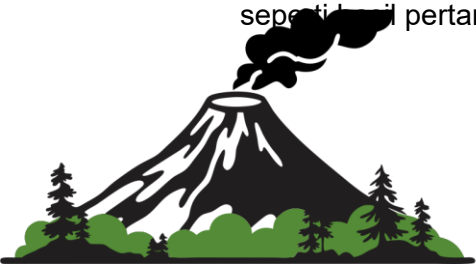
Gambar 2. Perjalanan Sejarah Taman Nasional Gunung Merapi

TNGM bersama Taman Nasional Gunung Merbabu dan Suaka Margasatwa Sermo telah mendapatkan pengakuan secara internasional. UNESCO menetapkan Cagar Biosfer Merapi Menoreh Merbabu pada tanggal 28 Oktober 2020 seluas 254.876,75 Ha. Area Inti cagar biosfer tersebut memiliki luas 12.447,47 ha meliputi Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, dan Suaka Margasatwa Sermo. TNGM secara umum merupakan Situs Warisan Keanekaragaman Hayati atau Biological Diversity Site, sedangkan secara khusus Bukit Plawangan Turgo (Kompleks Batuan Merapi Tua Plawangan Turgo) termasuk dalam Situs Warisan Geologi atau Geosite yang merupakan bagian dari Geopark Jogja.

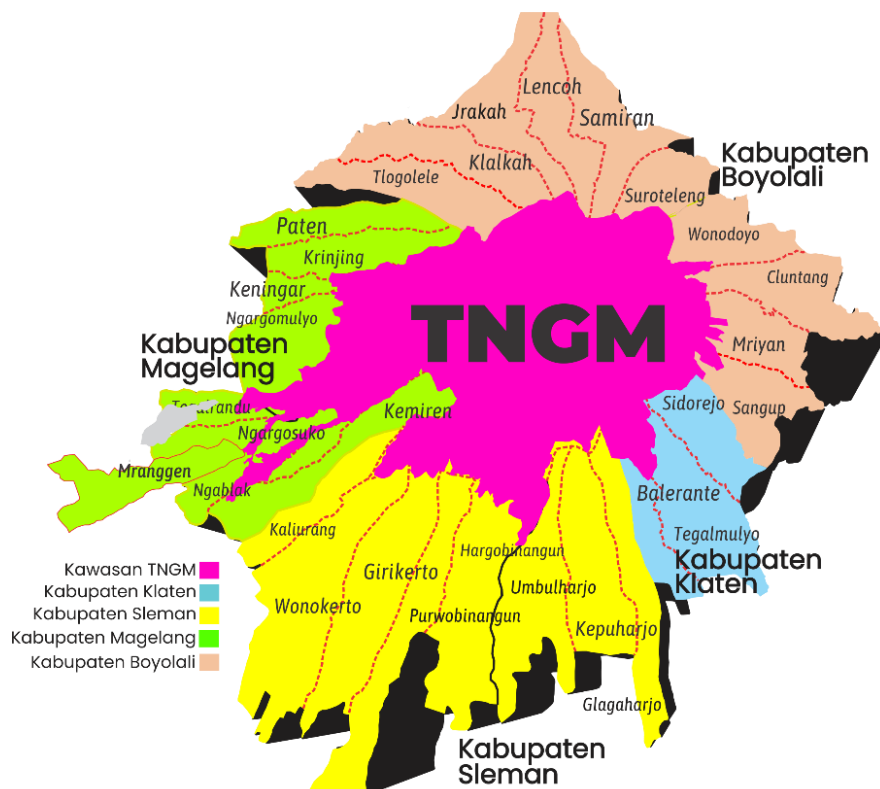
Berdasarkan SK Kepala Balai TNGM Nomor: SK. 19/BTNGM/KONS/2015, BTNGM berbatasan langsung dengan 30 desa. Adapun desa – desa tersebut yaitu 7 desa di Propinsi DIY dan 23 di Jawa tengah. Data dari BPS 2016, menyatakan bahwa 107.488 jiwa berada pada daerah penyangga TNGM. Angka pertumbuhan rata-rata 1.97% di daerah penyangga, sehingga pada masa yang akan datang, kepadatan akan terus meningkat pada daerah penyangga.

Taman Nasional Gunung Merapi dikelilingi oleh 30 desa penyangga yang memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat. Berikut adalah gambaran umum tentang desa-desa tersebut:

1. Peran Penting Penyangga Ekosistem: Desa-desa ini berfungsi sebagai buffer zone yang melindungi kawasan taman nasional dari aktivitas yang merusak. Sumber Daya Alam: Mereka juga menjadi tempat pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti hasil pertanian dan kehutanan.



2. Keberagaman Budaya Kearifan Lokal: Setiap desa memiliki tradisi dan budaya yang berbeda, mencerminkan kearifan lokal yang kaya. Kegiatan Adat: Banyak desa yang masih melestarikan ritual dan perayaan tradisional yang terhubung dengan alam.
3. Ekonomi Masyarakat Pertanian dan Perkebunan: Penduduk desa sebagian besar bergantung pada pertanian, dengan hasil seperti sayuran, buah-buahan, dan kopi. Ekowisata: Beberapa desa mengembangkan potensi ekowisata, menawarkan wisata alam, trekking, dan pengalaman budaya.
4. Konservasi dan Pendidikan Lingkungan Program Konservasi: Desa-desa ini terlibat dalam program-program konservasi untuk menjaga kelestarian hutan dan biodiversitas. Edukasi Lingkungan: Banyak desa yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam.
5. Keberlanjutan dan Partisipasi Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat desa berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan konservasi, bekerja sama dengan pihak pemerintah dan LSM. Inisiatif Berkelanjutan: Desain program-program yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, seperti pertanian organik dan pengelolaan limbah.



Gambar 3. 30 Desa Penyangga Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi



Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029, diharapkan target-target sasaran tetap mendukung program-program prioritas. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yang bertema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” menetapkan Trisula Pembangunan sebagai prioritas utama, yaitu: Pertumbuhan Tinggi yang Berkelanjutan, Pengurangan Kemiskinan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, RKP 2026 memuat berbagai program nasional unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Perumahan, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan, Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 Balai Taman Nasional Gunung Merapi diharapkan mampu menerjemahkan tema RPK dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga akan bermanfaat bagi pembangunan kehutanan pada umumnya dan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada khususnya

Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem cq. Balai Taman Nasional Gunung Merapi mendukung 2 (dua) dari 8 (tujuh) Prioritas Nasional, diantaranya yaitu **Prioritas Nasional 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”**. Sasaran utama pada Prioritas Nasional 2 ini yang didukung oleh Kementerian adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, dan **Prioritas Nasional 6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”** dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Balai Taman Nasional Gunung Merapi diberikan alokasi anggaran dalam rangka mendukung Prioritas Nasional tahun 2025 terangkum sebagaimana tabel dibawah

Dalam pencapaian target kinerja, khususnya yang terkait dengan Prioritas Nasional dan *Major Project*, penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas 8 Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2025; (2) memastikan konsistensi



perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Major Project (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multipihak; dan (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.



Gambar 4. Pendekatan Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam RKP Tahun 2026

Rencana Kerja Balai TNGM Tahun 2026 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (RKA-K/L), yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Balai TNGM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai TNGM menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;



2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
5. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
6. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
7. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
8. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
9. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
10. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
11. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
12. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
13. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
14. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
16. Pengelolaan kawasan taman nasional; dan
17. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Balai TNGM berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini,





Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, per Desember 2025, Balai TNGM didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 72 orang PNS dan 37 orang PPPK, sebagaimana rincian tabel dibawah ini

Tabel 1. Jumlah Pegawai Taman Nasional Gunung Merapi Berdasarkan Jabatan 2025

No	Jabatan	PNS Tahun 2025					PPPK Tahun 2025					
		IV	III	II	I	JML	IX	VII	V	III	I	JML
1	Struktural	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	0
2	Polisi Hutan	1	13	3	-	17	-	-	-	-	-	0
3	Pengendali Ekosistem Hutan	4	12	-	-	16	1	2	3	-	-	6
4	Penyuluh Kehutanan	1	13	-	-	14	-	-	-	-	-	0
5	Analisis SDMA	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	0
6	Perencana	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
7	Pengadaan Barang dan Jasa (Di perbantukan Biro Umum)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0
8	Pranata Komputer	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2
9	Pranata Keuangan APBN Mahir	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	0
10	Fungsional Umum	1	13	-	-	14	-	-	-	-	-	0



No	Jabatan	PNS Tahun 2025					PPPK Tahun 2025					
		IV	III	II	I	JML	IX	VII	V	III	I	JML
11	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	1
12	Arsiparis	-	-	-	-	0	2	2	-	-	-	4
13	Manggala Agni	-	-	-	-	0	-	-	20	-	-	20
14	Pengelola umum Operasional	-	-	-	-	0	-	-	-	3	2	5



BAB II

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2025 DAN PROGNOSIS TAHUN 2026

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan merupakan tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan mandat konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan sistem penyangga kehidupan, serta pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap indikator kinerja ini tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi dasar dalam memastikan bahwa upaya konservasi berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, ketahanan ekosistem, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

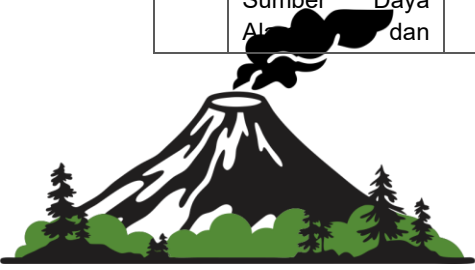
Dalam dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Balai Taman Nasional Gunung Merapi dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tekanan terhadap sumber daya alam, perubahan iklim, serta meningkatnya kebutuhan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pencapaian indikator kinerja kegiatan mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Hasil capaian ini sekaligus menjadi bahan refleksi untuk memperkuat strategi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Pelaksanaan rencana kerja kedepan harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, dengan tujuan perbaikan dan peningkatan kinerja yang belum optimal, sehingga dapat dijadikan tolok ukur perencanaan tahun berikutnya, serta melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi.

Tabel 2. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

No.	Stakeholders Perspective	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Penilaian %
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.1.2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, Efisien, transparan, dan akuntabel**	33 Persen	33 Persen	100



No.	Stakeholders Perspective	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Penilaian %
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat	2.1	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	2.1.1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif**	1 Unit	1 Unit	100
		2.2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	2.2.1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati**	3 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	100
3	Peningkatan pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi	3.2	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	3.2.1	Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB**	931.345.000 Rupiah	3.828.463.000 Rupiah	150
4	Peningkatan pemulihan ekosistem kawasan konservasi dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	4.1	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	4.1.2	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB*	20 Hektar	23 Hektar	115
5	Peningkatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik yang lestari dan berkelanjutan	5.1	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	5.1.1	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya**	1 Spesies	1 Spesies	100
		5.2	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	5.2.1	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi**	1 Produk	2 Produk	150
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Agile, Efektif dan Efisien	6.1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	6.1.1	Nilai Maturitas SPIP	3.8 Poin	3.99 Poin	105
	Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan	7.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup	7.1.1	Nilai SAKIP	86.05 Poin	76,80 Poin	89



No.	Stakeholders Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Penilaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ekosistem	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem				
RATA-RATA CAPAIN KINERJA						112

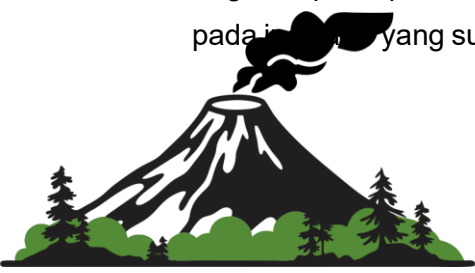
Pengukuran Capain kinerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Dirjen KSDAE selaku pemberi mandat mengenai target dan capaian yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun berjalan, termasuk membandingkan antara rencana dan realisasi. Proses ini diharapkan mendukung perbaikan berkelanjutan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang dibuat pada tahun 2025, capaian kinerja dihitung berdasarkan rerata capaian 9 indikator kinerja kegiatan tahun 2025. Capaian kinerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebesar 112% ini lebih rendah sedikit dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 0,17% hal ini menunjukkan bahwa menjaga capaian kinerja suatu instansi sangat susah.

Satuan Kerja yang telah menunjukkan **capaian kinerja di atas target** pada dasarnya berada pada fase kematangan sistem. Pada kondisi ini, fokus mempertahankan capaian menjadi relevan karena orientasinya bergeser dari sekadar kuantitas menuju **kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan hasil**. Upaya mempertahankan capaian tidak berarti stagnasi, melainkan memastikan bahwa standar layanan, mutu output, dan dampak program tetap terjaga tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya manusia. Strategi ini cenderung lebih efisien karena tidak menuntut ekspansi besar, sekaligus menurunkan risiko penurunan kualitas akibat pemaksaan target baru yang melampaui kapasitas riil.

Secara manajerial, mempertahankan capaian kinerja yang sudah tinggi mencerminkan fase **konsolidasi dan optimalisasi**, di mana satuan kerja menitikberatkan pada stabilitas sistem, efisiensi proses, dan penguatan kualitas hasil. Sementara itu, peningkatan capaian kinerja lebih identik dengan fase **pertumbuhan (growth)** yang menuntut energi lebih besar. Tantangan yang sering muncul adalah kecenderungan suatu satuan kerja terus mengejar peningkatan angka kinerja meskipun sistem sudah berada pada titik jenuh, yang justru dapat menimbulkan inefisiensi dan penurunan kualitas.

Dengan demikian, mempertahankan capaian kinerja lebih yang telah melampaui target dapat dipandang sebagai strategi rasional dan berorientasi keberlanjutan, terutama pada j yang sudah berada pada kategori sangat baik. Pendekatan peningkatan kinerja



tetap diperlukan, namun sebaiknya dilakukan secara selektif pada indikator prioritas yang memiliki dampak besar dan masih menunjukkan kesenjangan capaian.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2025

NO	IKK	CAPAIAN DAN TARGET	
		2025	2026
1	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya (25 Spesies)	1	2
2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (33 Persen)	33	33
3	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan (4.100 Ha)	-	300
4	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB (628 Ha)	20	27
5	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif (1 Unit)	1	1
6	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (12 Kelompok Masyarakat)	3	2
7	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan (2 Desa)	-	2
8	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi (1 Produk)	2	-
9	Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless paymen (100%)	50	50
10	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB (2,75 Milyar Rupiah)	3.828.463.000	1.250.600.00
11	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (4 Poin)	3,99	3,92
12	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	76,8	86,25

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2025 DAN PPROGNOSIS TAHUN 2026

Tahun 2025 Balai Taman Nasional Gunung Merapi mendapatkan pagu tahun sebesar Rp.15,954,064,000,- yang merupakan pagu anggaran dari beberapa kali proses efisiensi dan revisi penambahan maupun pengurangan pagu anggaran. Selain untuk pemenuhan belanja pegawai efisiensi anggaran dilakukan untuk memenuhi kegiatan prioritas pembangunan nasional, peningkatan kualitas belanja negara, penguatan keberlanjutan fiskal, penyesuaian kapasitas pelaksanaan, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, jadi esensinya bukan sekadar pengurangan biaya, tetapi strategi memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak maksimal.

Pagu anggaran yang didapatkan ini digunakan untuk membiayai dua program kegiatan yaitu Program Pengelolaan Hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen. Berdasarkan prognosis realisasi anggaran bahwa berdasarkan jenis belanja realisasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebesar Rp.15,953,785,661,- atau 100% dengan detail realisasi Belanja sebagaimana tabel di dibawah ini



Tabel 4. Realisasi Anggaran tahun 2024 dan tahun 2025

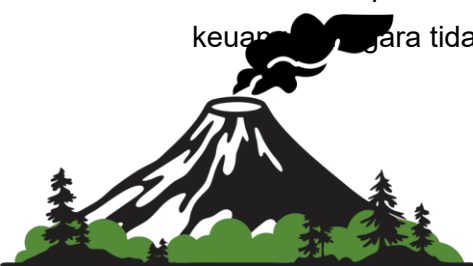
X 1000 rupiah

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE (%)
PEGAWAI	10,509,000	10,506,737	99.98	12,142,619	12,142,428	100
BARANG	5,820,641	5,757,578	98.92	3,781,445	3,781,357	100
MODAL	4,158,609	4,151,954	99.84	30.000	30.000	100
TOTAL	20,488,250	20,416,270	99.65	15,954,064	15,953,785	100

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Taman Nasional Gunung Merapi pada Tahun 2025 adalah sebesar 98,74 atau kategori sangat baik berdasarkan hasil laporan capaian NKA lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Gunung Merapi menempati urutan keempat dari tujuh puluh Unit Pelaksana Teknis. Nilai NKA didapatkan dari rata-rata antara capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau biasa yang sering dikenal dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), berdasarkan Om Span Capaian IKPA Balai Taman Nasional Gunung Merapi sampai dengan bulan Desember sebesar 97,48 (sangat baik) yang diperoleh dari 3 Unsur Utama Yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 95,78%, Kualitas pelaksanaan Anggaran sebesar 97,16% dan Kualitas hasil pelaksanaan Anggaran sebesar 100% dan berdasarkan Monitoring pada aplikasi SMART DJA Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100% (sangat baik) yang diperoleh dari aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2024 capaian ini naik cukup besar dan diharapkan pada tahun 2026 nanti capaian nilai-nilai tersebut bisa dipertahankan dan jika dimungkinkan bisa ditingkatkan menjadi lebih tinggi baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan hasil/output.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, yang tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut dikelola secara efektif, efisien, tepat waktu, dan menghasilkan output sesuai perencanaan. Dengan kata lain, Nilai Kinerja Anggaran menggambarkan hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran.

Konsep Nilai Kinerja Anggaran menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak semata diukur dari tingginya persentase realisasi belanja, tetapi juga



dari kualitas proses penganggaran dan ketepatan capaian kinerja. Oleh karena itu, penilaian kinerja anggaran umumnya mencakup beberapa aspek utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, konsistensi pelaksanaan dengan rencana penarikan dana, ketepatan waktu penyerapan, efisiensi penggunaan dana, serta pencapaian output kegiatan.

Dalam praktiknya, Nilai Kinerja Anggaran menjadi indikator penting dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Nilai ini mencerminkan sejauh mana anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan. Instansi dengan Nilai Kinerja Anggaran yang baik menunjukkan bahwa proses perencanaan telah realistis, pelaksanaan berjalan sesuai jadwal, serta hasil kegiatan dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Selain itu, Nilai Kinerja Anggaran juga berfungsi sebagai alat evaluasi manajerial. Melalui nilai ini, pimpinan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan, keterlambatan pelaksanaan, atau inefisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, Nilai Kinerja Anggaran berperan dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan, peningkatan disiplin perencanaan, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Anggaran dapat dipahami sebagai indikator komprehensif yang menilai seberapa baik anggaran dikelola untuk menghasilkan kinerja, sehingga menjadi jembatan antara aspek keuangan dan aspek hasil pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Gunung Merapi pada tahun 2025 melaksanakan 15 Output Kegiatan dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Kegiatan dengan Perincian sebagaimana tabel berikut

Tabel 5. Rincian Output Kinerja Kegiatan tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET	REALISASI	PAGU (Rp.)
1	Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	1 Data	1	6,405,000
2	Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	3 Lokasi	3	89,000,000
3	Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Spesies Liar	1 Spesies	1	100,000,000
4	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	1500 Orang	1834	44,300,000
5	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1 Dokumen	1	48,750,000
6	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	20 Ha	23	15,340,000
7	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1 Dokumen	5	80,000,000



NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET		REALISASI	PAGU (Rp.)
8	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1	Unit KK	20	69,000,000
9	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3	Kelompok	3	5,250,000
10	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	6607,52	Hektar	6607,52	1,204,129,000
11	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	28,56	Hektar	690,5	247,041,000
12	Layanan BMN	1	Layanan	1	5,050,000
13	Layanan Umum	1	Layanan	1	279,950,000
14	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	13,729,849,000
15	Layanan Prasarana Internal	1	UNIT	1	30,000,000



BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional.

Perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029 yang mengusung tema “Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan, dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sejalan dengan visi dan empat rumusan misi Kementerian Kehutanan, yang merupakan penerjemahan dari 4 Pilar Pembangunan Berkelanjutan pada lingkup tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mendukung 8 (delapan) prioritas nasional.

Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem cq. Balai Taman Nasional Gunung Merapi mendukung 2 (dua) dari 8 (tujuh) Prioritas Nasional, diantaranya yaitu **Prioritas Nasional 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”**. Sasaran utama pada Prioritas Nasional 2 ini yang didukung oleh Kementerian adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, dan **Prioritas Nasional 6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan**



ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Balai Taman Nasional Gunung Merapi diberikan alokasi anggaran dalam rangka mendukung Prioritas Nasional tahun 2025 terangkum sebagaimana tabel dibawah

Tabel 6 Alokasi anggaran Balai TN Gunung Merapi dalam mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Alokasi 2025 (Ribu Rupiah)
02- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	677,500,000,-
06- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	366,500,000,-

Prioritas Nasional 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, mempunyai sasaran Pembangunan yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE, sebagai berikut :

1. Tercapainya Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List sebanyak 50 spesies..
2. Turunya status keterancaman spesies pada IUCN Red List sebanyak 50 spesies
3. Tercapainya nilai ekspor TSL dan bioprospecting sebesar Rp. 8,4 Triliun.
4. Tercapainya Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar

Tabel 7 Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Kementerian Kehutanan pada Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas Nasional (PRO PN)	Rincian Output (RO)	Total (Rp)
02- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	Optimalisasi tata kelola kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman	40.000.000,-



Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas Nasional (PRO PN)	Rincian Output (RO)	Total (Rp)
			Buru (TB)	
			Penguatan Perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	250,000,000,-
			Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	100,000,000,-
			Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Areal Preservasi	80,000,000,-
		Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi	Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi di KSA, KPA dan TB	67,500,000,-
	Pengurangan Status Keterancam Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan	Pemberantasan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar, serta IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing	Peningkatan perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	100,000,000,-
	Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati	Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati	Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati	40,000,000,-



Prioritas Nasional 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, mempunyai sasaran Pembangunan yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu tercapainya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

Tabel 8 Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Kementerian Kehutanan pada Prioritas Nasional 6

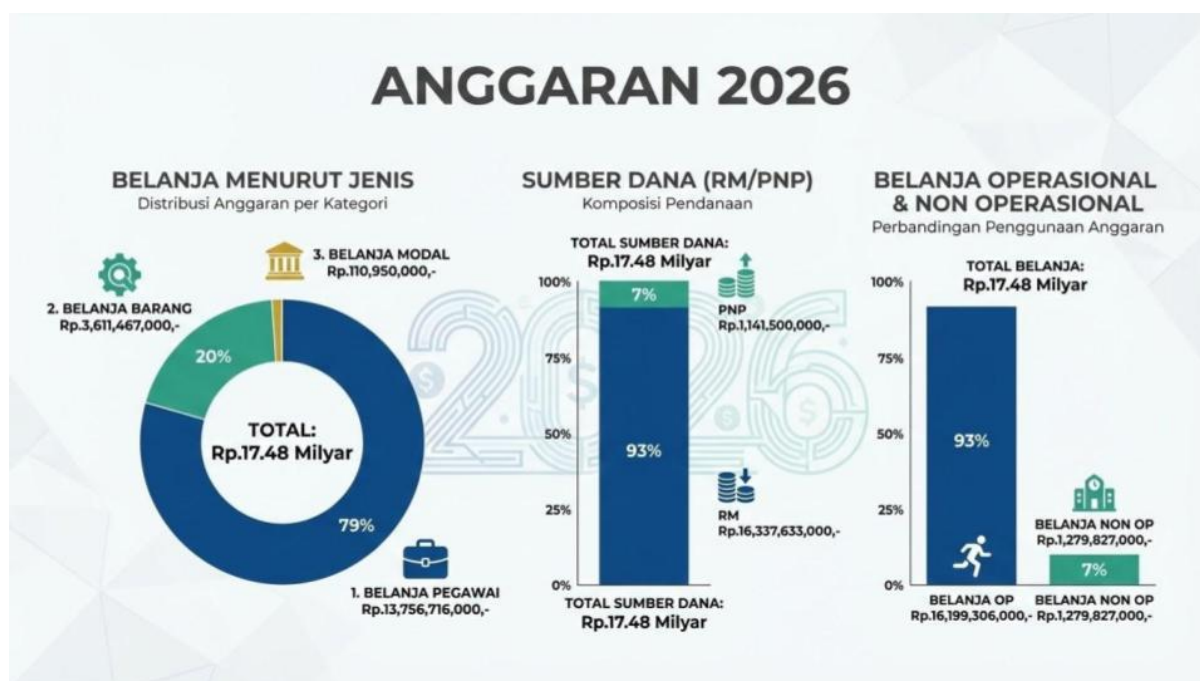
Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas Nasional (PRO PN)	Rincian Output (RO)	Total (Rp)
06- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Keaneekaragaman Hayati	Pelibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	244,000,000,-
			Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keaneekaragaman Hayati	80,000,000,-
	Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi	Pengelolaan Wisata Alam dan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Jasling Wisata Alam	42,500,000,-

B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Kedua dalam periode RPJMN 2025–2029 merupakan tahap krusial dalam memastikan arah pembangunan nasional tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Pada fase ini, fokus pembangunan tidak hanya menekankan keberlanjutan program prioritas, tetapi juga penguatan kualitas pelaksanaan, percepatan pencapaian target, serta konsolidasi berbagai hasil awal yang telah diraih pada tahun pertama. RKP tahun kedua menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan lingkungan, serta reformasi tata kelola pemerintahan.



Melalui RKP ini, pemerintah mendorong sinergi pusat dan daerah, keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas belanja negara agar setiap intervensi pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, RKP tahun kedua tidak hanya berfungsi sebagai dokumen tahunan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali untuk memastikan pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029 berjalan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Alokasi Anggaran Belanja pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi TA 2026 sebesar Rp.17,479,133,000,- dimana 79% merupakan belanja pegawai sehingga anggaran yang ada sekitar 21% harus digunakan dan diimplementasikan dalam pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan, dalam penyusunan rencana kinerja TA 2026 dapat memperhatikan sasaran dan agenda Pembangunan tahun 2026, serta pokok-pokok kebijakan belanja Direktorat Jenderal KSDAE yang tentunya sudah diinternalisasikan ke dalam perencanaan Kementerian kehutanan. Secara detail komposisi anggaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 6. Komposisi Anggaran Tahun 2026

Dalam rangka menghasilkan Renja yang efisien, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, seluruh aktifitas pembangunan Balai Taman Nasional difasilitasi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp.1,259,000,000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.16,220,133,000,-



Tema pembangunan kehutanan 2026 mengusung semangat: Aktualisasi Hutan untuk Pangan, Energi, Sumber Daya Air, dan Hilirisasi Produk Hutan dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah, selaras dengan tema pembangunan nasional Tahun 2026: Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, tema ini mencerminkan fokus pembangunan kehutanan yang tidak hanya pada konservasi dan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, tetapi juga pemanfaatan fungsi hutan untuk mendukung ketahanan pangan, penyediaan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan hilirisasi produk kehutanan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional

Pembangunan tahun 2026 menempatkan hutan tidak hanya sebagai kawasan lindung, tetapi sebagai sistem penyangga kehidupan yang menopang ketahanan pangan, energi, air, serta pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, program konservasi berperan sebagai fondasi ekologis yang memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.

1. Konservasi sebagai Penopang Ketahanan Pangan

Program konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi mendukung prioritas pangan melalui:

- Pelestarian sumber plasma nutfah (tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme) yang berpotensi dikembangkan untuk pangan, obat, dan budidaya adaptif terhadap perubahan iklim.
- Menjaga fungsi ekosistem penunjang produksi pangan, seperti kesuburan tanah, pengendalian hama alami, serta proses penyerbukan.
- Pengembangan pemanfaatan tradisional dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara lestari oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi.

2. Konservasi dalam Mendukung Ketahanan Energi

Meskipun kawasan konservasi bukan wilayah eksploitasi energi, perannya tetap strategis:

- Menjaga tutupan hutan sebagai penyerap karbon, mendukung transisi energi rendah emisi.
- Memelihara keseimbangan ekosistem yang memungkinkan pengembangan bioenergi di luar kawasan konservasi tanpa merusak fungsi ekologis regional.
- Perlindungan bentang alam yang mendukung keberlanjutan sumber energi air (PLTA/PLTMH) melalui pengaturan tata air alami.

3. Konservasi sebagai Penjamin Ketersediaan Air

Ini adalah sinergi paling langsung:

- Kawasan konservasi berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang menjaga kuantitas dan kualitas air.
- Pengendalian erosi, sedimentasi, dan banjir melalui perlindungan vegetasi alami.



- Mendukung penyediaan air untuk pertanian, rumah tangga, industri, dan energi.

4. Konservasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Program konservasi berkontribusi pada ekonomi melalui pendekatan berkelanjutan:

- Ekowisata berbasis kawasan konservasi yang membuka lapangan kerja lokal.
- Kemitraan konservasi dengan masyarakat (desa penyangga) untuk usaha HHBK, jasa lingkungan, dan ekonomi kreatif berbasis alam.
- Skema pembayaran jasa lingkungan (air, karbon, wisata alam).

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program, untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu, yaitu sebagai berikut

Tabel 9. Sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancamannya spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

Tahun 2026 dalam mendukung tiga sasaran program Ditjen KSDAE, Balai Taman nasional Gunung Merapi mengampu 8 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana rincian dibawah ini:

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1, 2 dan 3

Kode dan Uraian		Target
SP1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	



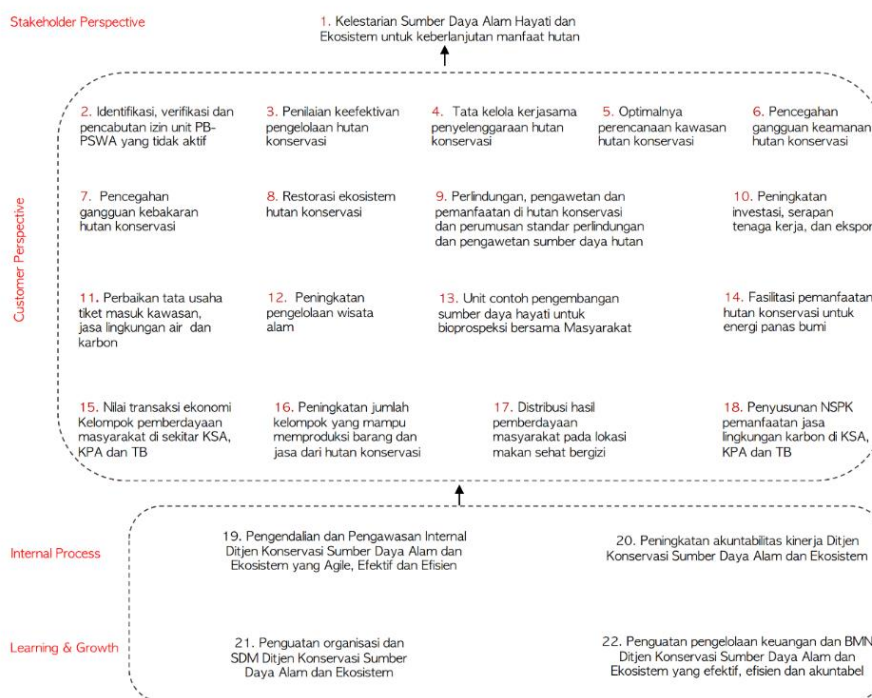
Kode dan Uraian			Target
	IKP2	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	
	SK1	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	
	IKK1	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	2 Spesies
	SK2	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	
	IKK1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	0,75 Poin
	IKK2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	33 Persen
	SK3	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	
	IKK1	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	300 Ha
	IKK2	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	27 Ha
	SK4	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	
	IKK2	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	1 UNIT
SP2		Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	
	IKP1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	
	SK1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	
	IKK1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	2 Kelompok
	SK2	Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat	
	IKK1	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	2 Kelompok
SP3		Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	
	IKP2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	
	SK2	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan	
	IKK1	Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	50 Persen
	IKK2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Rp.1.250.600.000,-

Secara keseluruhan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya tahun 2026 ini Pagu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp.1.977.752.853.000,- dengan target kinerja sebagaimana gambar dibawah ini



Pagu dan Kinerja

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem



Gambar 7. Target Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2026

Dalam rangka mendukung kinerja Direktorat KSDAE sebagaimana di atas, Balai Taman Nasional gunung Merapi tahun 2026 mewujudkannya dengan 11 Target Rincian Output sebagai mana table berikut:

Tabel 11. Target Rincian Output Tahun 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rincian Output		Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1.1	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1.1.1	Optimalisasi tata kelola kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1 dokumen	80,000,000,-
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan	2.1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	2.1.1	Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka	1 lembaga	69,000,000,-



No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rincian Output		Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)		(3)		(4)	(5)
	KSA, KPA, dan TB				Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)		
				2.1.2	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	6.607.52 Hektar	1,204,129,000,-
				2.1.3	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	28.56 Hektar	247,041,000,-
3	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	5.1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	3.1.1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	5,250,000,-
4	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan	4.1	Nilai PNBP dari Pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	4.1.1	Sosialisasi, promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan di KSA, KPA, dan TB	1.500 orang	44,300,000,-
				4.1.2	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	1 dokumen	48,750,000,-
5	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	5.1	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	5.1.1	Pemulihan Ekosistem Daratan yang Terdegradasi di KSA, KPA, dan TB	20 hektar	15,340,000,-
6	Meningkatnya 26paya	6.1	Jumlah spesies terdata	6.1.1	Penguatan Data dan Informasi	1 data	6,405,000,-



No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rincian Output		Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)		(3)		(4)	(5)
	pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik		sebaran dan/atau populasinya		Keanekaragaman Hayati		
		6.1.2		Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	3 lokasi	89,000,000,-	
7	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	7.1	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	7.1.1	Pengembangan Bioprospeksi Sumber Daya Genetik Spesies Liar	1 spesies	100,000,000,-
8	Pengendalian dan Pengawasan Internal Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang Agile, Efektif dan Efisien	8.1	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	8.1.1	Nilai Maturitas SPIP	3.8 Poin	285,000,000,-
9	Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	9.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	9.1.1	Nilai SAKIP	86.05 Poin	285,000,000,-

Dari sebelas rincian output yang ditargetkan tersebut juga mendukung enam kegiatan lingkup Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana table berikut:

Tabel 12. Detail Kegiatan Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Konservasi Spesies dan Genetik	195,405,000,-
2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	93,050,000,-
3	Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	15,340,000,-
4	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	80,000,000,-
5	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	1,525,420,000,-
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	14,044,849,000,-
TOTAL		15,954,064,000,-



C. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan kegiatan pembangunan kehutanan Tahun 2026 pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan pendekatan strategis yang diintegrasikan ke dalam seluruh siklus manajemen pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan secara berkelanjutan, inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Balai TNGM, pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat fungsi kawasan taman nasional sebagai sistem penyangga kehidupan sekaligus sebagai ruang interaksi sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Dengan karakteristik kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, tekanan aktivitas masyarakat, serta potensi jasa lingkungan, pengarusutamaan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui pemberian akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemitraan konservasi, serta usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam secara lestari. Pendekatan ini mendukung terwujudnya keadilan sosial serta peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Inklusi sosial diwujudkan melalui pelibatan masyarakat desa penyangga sebagai mitra dalam konservasi, pengembangan jasa lingkungan, dan kegiatan ekonomi berbasis kawasan. Strategi ini berperan dalam menurunkan potensi konflik, memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan konservasi, serta mendorong model pengelolaan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercermin dalam kegiatan perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, konservasi spesies, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini mendukung pencapaian tujuan terkait aksi iklim, ekosistem daratan, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Transformasi digital menjadi bagian dari penguatan tata kelola melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data keanekaragaman hayati, pemantauan kawasan, pelayanan publik, serta sistem informasi perencanaan dan pelaporan. Hal ini meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kawasan.

Sementara itu, pembangunan rendah karbon diarusutamakan melalui kegiatan perlindungan tutupan hutan, pemulihan ekosistem, serta pengendalian kebakaran hutan dan





lahan. Peran kawasan TNGM sebagai penyerap karbon dan pengatur tata air menjadikan konservasi sebagai kontribusi nyata terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, pengarusutamaan kegiatan pembangunan kehutanan Tahun 2026 pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berorientasi pada aspek perlindungan ekologis, tetapi juga pada penguatan dimensi sosial, ekonomi, tata kelola, dan keberlanjutan pembangunan. Pendekatan ini memperkuat posisi konservasi sebagai fondasi pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta mendukung tercapainya sasaran kinerja organisasi dan prioritas pembangunan nasional.



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran operasional dari perencanaan strategis yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan selaras dengan sasaran pembangunan, prioritas nasional, serta tugas dan fungsi organisasi.

Melalui Renja ini diharapkan seluruh unit kerja dapat melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, efektif, dan akuntabel. Kualitas perencanaan yang baik perlu diikuti dengan pelaksanaan yang disiplin, pengendalian yang konsisten, serta evaluasi berkala agar setiap output yang dihasilkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat bergantung pada sinergi antarunit kerja, dukungan sumber daya manusia yang profesional, tata kelola yang baik, serta komitmen bersama untuk menjaga efisiensi dan kualitas belanja. Dengan demikian, pelaksanaan rencana kerja ini tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak.

Renja ini juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian sesuai perkembangan kebijakan, kondisi strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, pengawasan, dan pelaporan yang berkesinambungan sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan konservasi dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pengelolaan kawasan yang lestari, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.



LAMPIRAN





BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl. Kaliurang KM 22,6, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582